

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan Orde Baru yang telah berkuasa selama kurang lebih 32 tahun yakni suatu kurun yang cukup panjang bagi sebuah pemerintahan, runtuh pada 21 Mei 1998. Arus demokratis, di mana salah satu motor penggeraknya adalah mahasiswa, ternyata tidak dapat dibendung oleh berbagai usaha yang coba dilakukan oleh pemerintah tersebut untuk meredamnya. Jika dilihat secara cermat jatuhnya pemerintahan Orde Baru sesungguhnya, sebagaimana dikatakan Amien Rais, disebabkan oleh dua hal utama. *Pertama*, sistem social, politik, dan ekonomi yang dibangun pada kenyataannya tidak *tenable* dan *sustainable* karena tidak menjamin adanya akuntabilitas dan kreativitas. Kedua, struktur mental yang korup dan predatorik ternyata tumbuh semakin parah dari waktu ke waktu selama kekuasaannya itu. Memang diakui bahwa orde baru telah menampilkan keberhasilan pembangunan dalam berbagai hal. Tetapi di sisi lain, ia juga menghadirkan penyakit-penyaki sosial dan ekonomi, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Maka, ketika krisis ekonomi yang dimulai sejak 1997 yang pada gilirannya menyebabkan krisis politik dan merebaknya demonstran mahasiswa dimana-mana, pemerintahan Orde Baru pun tidak dapat berkuatir sama sekali. Dengan demikian, berakhirlah periode yang dikenal di negeri ini dengan sebutan Orde Baru dengan tokoh utamanya Presiden Soeharto. Tampuk kekuasaan

kemudian diberikan kepada wakil Presiden Prof. Dr. BJ. Habibie. (Faisal, 2012: 34)

Sejak tanggal 21 Mei 1998 yang bersejarah tersebut, dimulailah babakan baru dalam sejarah politik Indonesia yang dikenal dengan sebutan era Reformasi. Harapan baru terhadap kehidupan demokrasi pun tumbuh dalam segala aspek kehidupan; politik, ekonomi, sosial, dan agama. Pemerintahan BJ Habibie yang menggantikan Soeharto ternyata juga telah menandai era reformasi menuju Indonesia Baru. Gema reformasi pada gilirannya begitu kuat terdengar yang kemudian menemukan titik kulminasinya pada diselenggarakannya Pemilihan Umum 1999 yang demokratis dan dapat diterima oleh semua pihak.

Asal usul Partai Keadilan Sejahtera dapat ditelusuri dari gerakan dakwah Kampus. Dakwah kampus meliputi serangkaian kegiatan yang menyeru pada Agama yang dilakukan oleh dan untuk kalangan mahasiswa kampus. Munculnya dakwah kampus itu sendiri dapat dimaknai sebagai reaksi terhadap ketidakramahan dan tindakan represif rezim Soeharto terhadap kelompok Islam “politik” yang terlihat sejak menit pertama setelah Soeharto berada di tampuk kekuasaan. (Muhtadi, 2012: 32)

Pada tahun 1985 Soeharto mewajibkan semua organisasi massa, termasuk Partai Politik, menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal organisasinya. Kebijakan ini membuat geram sejumlah tokoh Islam, yang kemudian menyebut rezim Soeharto telah memberlakukan “Islam Politik” sebagai *Kutjing Karap*. Ketika represi terhadap kelompok “Islam Politik” dan depolitisasi mahasiswa

mencapai puncaknya, mesjid kampus menjadi –meminjam istilah Jalaluddin Rakhmat- sangkar sebagai katalisator untuk mengekspresikan rasa frustrasi dan ketidakpuasan politik. (Muhtadi, 2012: 36)

Pada tahun 1980-an, dakwah kampus mulai memperkenalkan istilah Usrah (bahasa Arab yang berarti “keluarga”) dan mulai melakukan pengaturan dan pelatihan bagi anggota-anggotanya dengan system dan program yang lebih sistematis. Usrah adalah kelompok-kelompok kecil yang saling berhubungan secara dekat serta dirajut melalui struktur hierarkis. Dari struktur semacam ini, dakwah kampus berkembang pesat dan mesjid-mesjid kampus sejak saat itu menjadi pusat aktivitas mereka. (Muhtadi, 2012: 37)

Dakwah kampus kemudian bermetamorfosis menjadi Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang resmi, yaitu Lembaga Dakwah Kampus (LDK). LDK adalah strategi jitu aktivitas dakwah dalam rangka memperluas jejaring, rekrutmen dan organisasi. Pada pertengahan 1980-an, LDK resmi didirikan oleh sejumlah mahasiswa Muslim yang aktif dalam kegiatan dakwah kampus di Universitas Indonesia. Tak lama setelah berdiri, LDK menjalin jejaring dengan berbagai lembaga gerakan dakwah di kampus-kampus Universitas lain. Bagaikan cendawan di musim hujan, bermunculah lembaga dakwah kampus di berbagai universitas bergengsi dan terkenal di Jawa dan Sumatera yang tumbuh secara pesat. Jejaring aktivis LDK antarkampus itu kemudian memperluas wadah dengan mendirikan Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK). (Muhtadi, 2012: 39)

Dalam perkembangan berikutnya, meskipun banyak perbedaan, berbagai faksi dan kubu di LDK akhirnya tetap sepakat mendukung pendirian Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK) pada tahun 1986. FSLDK adalah forum kordinasi para aktivis dakwah di berbagai kampus di seluruh Indonesia yang bertujuan untuk membangun jejaring dakwah yang lebih luas dan terorganisir. Dengan memanfaatkan pertemuan tahunan FSLDK ke-10 di Malang pada 1998, yang dihadiri oleh ratusan dari segala penjuru Indonesia, beberapa aktivis LDK mengumumkan pembentukan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). (Muhtadi, 2012: 43)

Salah satu unsur gerakan mahasiswa yang muncul di tahun 1998 dan bisa dikategorikan sebagai kelompok aksi –menggunakan terminologi Haynes- adalah KAMMI yang lahir pada 29 Maret 1998, dua bulan sebelum lengsernya Presiden Soeharto. Berawal dari para peserta pertemuan FSLDK ke-10 di Universitas Muhammadiyah Malang, yang sepakat untuk merespon situasi krisis nasional yang sedang terjadi, mereka membentuk wahana baru bagi aksi-aksi politik sebagai bentuk peran dan tanggung jawab sosial-politik para aktivis Lembaga Dakwah Kampus. (Sidiq, 2003: 28)

Segera setelah pengunduran diri Soeharto pada 21 Mei 1998, tokoh-tokoh KAMMI mulai mempertimbangkan untuk mendirikan Partai Politik Islam. Inisiatif ini juga didukung oleh beberapa aktivis dakwah kampus yang berpandangan bahwa jejaring dan sumber daya gerakan dakwah yang telah ada seharusnya ditransformasikan ke dalam partai politik. Mereka percaya bahwa

jejaring dan sumber daya gerakan dakwah yang telah ada seharusnya ditransformasikan ke dalam partai politik. (Muhtadi, 2012: 44)

Era reformasi yang ditandai dengan lengsernya Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998, membawa berkah bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. Peristiwa ini disambut dengan euphoria politik yang gegap gempita dan semangat kebebasan berekspresi dan berkumpul yang sangat luas. Tak ayal hanya dalam kurun waktu dari sepuluh bulan (akhir Mei 1998 hingga awal Februari 1999), telah terbentuk partai politik baru sebanyak 181 buah, salah satunya ialah Partai Keadilan.

Maka tepat pada tanggal 20 Juli 1998 lahirlah Partai Keadilan, yang kemudian mendeklarasikan pendirian Partai Keadilan pada tanggal 9 Agustus 1998 di Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta, dengan jumlah massa yang hadir pada saat itu lebih dari 50 ribu orang (Burhanuddin, 2004: 23). Lahirnya Partai Keadilan dapat dilihat sebagai akibat terbukanya kesempatan politik pasca jatuhnya rezim Soeharto. Jamaah Tarbiyah atau yang lebih dikenal dengan para aktivis dakwah kampus memanfaatkan momentum tersebut dengan mendeklarasikan Partai Keadilan sebagai kendaraan politik untuk memperjuangkan agenda dan cita-cita politik mereka dalam desain dan system politik yang lebih demokratis.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum 1999 mengikutsertakan beberapa partai politik, salah satunya ialah Partai Keadilan. Di Pemilu ini Partai Keadilan hanya meraih 1.436.565 suara atau sekitar 1,36% suara dan menempatkan 7 wakilnya di DPR-RI. (Burhanuddin, 2004: 24). Hasil ini membuat Partai Keadilan

harus menghadapi realita, bahwa berdasarkan UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilu, mengharuskan partai yang suaranya kurang dari 2% pada pencapaian suara di Pemilu 1999 tidak bisa mengikuti Pemilu pada tahun 2004.

Hidayat Nur Wahid terpilih sebagai Presiden Partai dengan menggantikan Dr. Ir. H. Nur Mahmudi Ismail, M. Sc, dalam Musyawarah Nasional PK I pada 21 Mei 2000. (Nasrullah, 2007: 19). Musyawarah Nasional I Partai Keadilan yang berlangsung di Depok, berhasil memilih Dr. Hidayat Nur Wahid sebagai Presiden Partai Keadilan periode 2000-2005. Ia menggantikan Drs. Nurmahmudi Ismail yang mengundurkan diri dalam Munas I yang berlangsung sejak Kamis (18/5) hingga Minggu (21/5).

Karena tidak memenuhi batas minimum electoral threshold dalam Pemilu 1999, Partai Keadilan berubah nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada 2003, Hidayat Nur Wahid dipercaya menjadi sebagai Presiden Partai, sebutan untuk pimpinan PKS, sampai pada 2004. (Nasrullah, 2007: 8).

Partai Keadilan Sejahtera didirikan di Jakarta pada 20 April 2002 M atau bertepatan dengan 9 Jumadil 'Ula 1423 H. Pada tanggal 17 April 2003 Dr. Hidayat Nur Wahid (Presiden PK) dan Drs. Al Muzammil Yusuf (ketua umum PK-Sejahtera) memberikan rekomendasi penggabungan PK dengan PKS. PKS merupakan penerus perjuangan PK karena memiliki kesamaan tujuan dan cita-cita. Hal ini dinyatakan oleh kedua pimpinan partai tersebut saat mereka bersepakat dihadapan Notaris pada 3 Juli 2003.

Di. Pemilu 2004, Partai Keadilan Sejahtera memperoleh 45 kursi di DPR-RI, dan di Pemilu 2009, Partai Keadilan Sejahtera meraih 57 kursi, dan untuk selanjutnya di Pemilu 2014 Partai Keadilan Sejahtera memperoleh 40 Kursi di DPR-RI.

Melihat Perkembangan Partai Keadilan Sejahtera di tingkat nasional tersebut, tentunya membuat peneliti ingin mencari informasi lebih dalam lagi mengenai perkembangan Partai Keadilan Sejahtera di wilayah Sumatera Utara. Hal ini dikarenakan wilayah Sumatera Utara adalah sebuah Provinsi yang memiliki berbagai macam etnik. Sumatera Utara tentunya berbeda dengan daerah-daerah wilayah di Pulau Jawa. Dengan wilayah yang sangat luas, tentunya ada tantangan yang dihadapi para pelaku politik Partai Keadilan Sejahtera. Namun, perlu diketahui, bahwasannya Provinsi Sumatera Utara juga merupakan salah satu basis dari pergerakan politik Partai Keadilan Sejahtera di Indonesia. Hal ini bisa kita lihat, banyaknya posisi-posisi kursi legislatif di DPRD-Provinsi yang diduduki oleh kader-kader Partai Keadilan Sejahtera, dan juga keberhasilan Partai ini dalam meraih kursi eksekutif di pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Dimulai pada tahun 2008, Partai ini dapat meraih kursi eksekutif saat kadernya Gatot Puju Nugroho berhasil menempatkannya sebagai Wakil Gubernur Sumatera Utara, dan pada tahun 2013, berhasil merebut kursi Gubernur Sumatera Utara untuk periode 2013-2018.

Ada banyak penelitian dan penulisan yang dilakukan oleh para pengamat terkait fenomena partai ini secara global, namun masih sedikit tulisan ataupun catatan mengenai perkembangan dan partisipasi politik Partai Keadilan Sejahtera

di wilayah Sumatera Utara. Hal ini membuat peneliti lebih tertarik untuk meneliti perkembangan dan partisipasi politik partai ini di wilayah Sumatera Utara. Berangkat dari gambaran tersebut peneliti ingin meneliti secara mendalam perjalanan partai ini berdirinya (1998) hingga 2014 di wilayah Sumatera Utara, dimana peneliti membatasi perkembangan dan partisipasi politik dari Partai Politik ini. Adapun judul penelitian ini dapat dirumuskan : “Perkembangan Dan Partisipasi Politik Partai Keadilan Sejahtera di Wilayah Sumatera Utara (1998-2014)”.

B. Identifikasi Masalah

Agar penelitian ini lebih jelas dan terarah, maka permasalahan diidentifikasi sebagai berikut:

1. Latar belakang berdirinya Partai Keadilan Sejahtera di Wilayah Sumatera Utara
2. Perkembangan Partai Keadilan Sejahtera di Wilayah Sumatera Utara (1998-2014)
3. Partisipasi Politik Partai Keadilan Sejahtera di Wilayah Sumatera Utara (1998-2014)

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah, maka perlu dibatasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : “Perkembangan dan Partisipasi Partai Keadilan Sejahtera Wilayah Sumatera Utara (1998-2014)”.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana latar belakang berdirinya Partai Keadilan Sejahtera di Wilayah Sumatera Utara?
2. Bagaimana perkembangan Partai Keadilan Sejahtera di wilayah Sumatera Utara (1998-2014)?
3. Bagaimana Partisipasi Politik Partai Keadilan Sejahtera di Wilayah Sumatera Utara (1998-2014)?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Latar belakang berdirinya Partai Keadilan Sejahtera di wilayah Sumatera Utara
2. Perkembangan Partai Keadilan Sejahtera di wilayah Sumatera Utara (1998-2014)
3. Partisipasi Politik Partai Keadilan Sejahtera di wilayah Sumatera Utara (1998-2014)

F. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian, maka diharapkan bermanfaat untuk :

1. Secara teoritis, menambah khazanah penelitian mengenai sejarah berdirinya Partai Keadilan Sejahtera di Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera Utara.

2. Secara akademis, memberikan kontribusi pengetahuan dan aplikasi baru terhadap perkembangan dan partisipasi politik Partai Keadilan Sejahtera di Wilayah Sumatera Utara (1998-2014).
3. Secara praktis, memberikan wawasan kepada peneliti tentang penulisan karya ilmiah dan hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi baik kepada partai politik maupun pemerintah mengenai perkembangan salah satu partai politik di Wilayah Sumatera Utara.
4. Sebagai masukan yang dapat digunakan bagi peneliti lain dalam waktu dan tempat yang berbeda.